

Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) Di Sambas

Sunandar, Duski Ibrahim dan Nor Huda

IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden
Fatah Palembang

nand2r@gmail.com, duski_uin@radenfatah.ac.id, nurhuda_ali@radenfatah.ac.id

Abstrac

The research is about "The Resonance of Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) in Sambas", which departs from historical events of Muhammad Basiuni Imran was appointed become Maharaja Imam, a highest religious position in the Sambas sultanate . The position is Ascribed Status, namely this position is obtained due to offspring, father and grandfather are Maharaja Imam. However, when the position was held by Muhammad Basiuni Imran there were changes in the Sambas community caused by social and political conditions that occurred in Sambas, in addition to his ability in the field of qualified religion. This research is a historical research conducted in four stages, namely: heuristics, verification, interpretation and historiography and using social and political approaches.

Keyword: Resonansi, Maharaja Imam, and Sambas

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) di Sambas”, yaitu berangkat dari peristiwa sejarah bahwa Muhammad Basiuni Imran dilantik menjadi Maharaja Imam, sebuah jabatan agama tertinggi di kesultanan Sambas. Jabatan tersebut bersifat *Ascribed Status*, yakni kedudukan ini diperoleh yang disebabkan oleh keturunan, ayah dan Kakeknya adalah Maharaja Imam. Akan tetapi ketika jabatan tersebut dipegang oleh Muhammad Basiuni Imran telah terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat Sambas yang disebabkan oleh kondisi sosial dan politik yang terjadi di Sambas, disamping kemampuannya dalam bidang agama yang mumpuni. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dilakukan dengan empat tahap, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi dan menggunakan pendekatan sosial dan politik.

Kata kunci: Resonansi, Maharaja Imam, and Sambas

Pendahuluan

Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) bagi masyarakat Sambas dikenal sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu agama. Ia memiliki latar keilmuan yang berkembang dalam dunia Islam saat itu, yaitu Mekah dan Mesir sebagaimana keterangan yang ia tulis atas permintaan Pijper sebagai berikut:

*“Pada waktu saya berumur 6 atau 7 tahun, ayah saya mengajar saya membaca Qur’an dan menyekolahkan saya di Sekolah Rakyat (Volksschool). Kemudian saya diajari dasar-dasar nahu dan saraf, yaitu dari kitab *âl-Jurrûmiyya* dan *Kaylânî*. Pada tahun 1319 H (1901-1902), saya dikirim ke Makkah *al-Musharrafah* untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk belajar bahasa Arab dan mendalami pengetahuan tentang Islam.”* (Pijper, 1985: 142-143, Bruinessen, 1992: 26)

Berbekal keilmuan tersebut, Muhammad Basiuni Imran diangkat sebagai Maharaja Imam di Kesultanan Sambas, di samping jabatan tersebut merupakan warisan yang diberikan secara turun-temurun dalam keluarganya hingga tiga generasi (kakek-ayah-anak) dan berakhir pada tahun 1976. Berakhirnya penggunaan gelar tersebut dimulai dari melemahnya pengaruh Kesultanan Sambas akibat pendudukan Jepang sejak tahun 1942.

Kehadiran Maharaja Imam dalam konstruksi sosial masyarakat Sambas diyakini memberikan pengaruh yang sangat berarti, yaitu perubahan-perubahan dalam aspek sosial agama yang menyangkut praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan bahwa peran dan fungsi ulama di Sambas telah menemukan tempatnya. Pada awalnya peran ulama sangat eksklusif hanya sebagai pelayan agama bagi kebutuhan keluarga dan kerabat istana saja, lama-kelamaan berubah menjadi pelayan ummat bagi seluruh masyarakat yang ada di Sambas. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah munculnya tradisi keilmuan yang terbangun antara masyarakat kepulauan Nusantara dan Timur Tengah. Proses inilah yang membina tradisi keilmuan di kalangan ulama Melayu yang mewujudkan sebuah jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah, sehingga Azyumardi Azra menyebutnya masa ini sebagai abad-abad yang paling dinamis dalam sejarah sosial-intelektual muslim (Azra, 2007: xviii).

Kehadiran ulama dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu Sambas menjadi sangat penting, sebagai kelompok elit sosial yang memberikan pengaruh dan dampak terutama menyangkut persoalan-persoalan kehidupan, tidak hanya masalah bagaimana menjalankan syariat agama, bahkan masuk dalam ranah politik. Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran juga terlibat dalam dunia politik, yaitu pada tahun 1955 ia dicalonkan sebagai anggota Konstituante dari partai Masyumi mewakili Sambas bersama dengan adiknya H. Zuhdi Imran dari Pemangkat. Pada saat pemilu konstituante Muhammad Basiuni Imran terpilih, sehingga melalui Surat Keputusan Panitia Pemeriksaan No. 305/1956/K, Basiuni ditetapkan sebagai Anggota Konstituante tahun 1956.

Keterkaitan ulama dengan persoalan politik menurut Martin van Bruinessen sulit dipisahkan, mereka terlembagakan dalam lembaga Qadi (Patoni, 2007: 138). Penelitian Martin yang dilakukan pada masyarakat Banten memperlihatkan bahwa Qadi sebagai lembaga hukum tertinggi di Kesultanan yang diisi oleh seorang yang ahli dalam bidang hukum Islam. Selain itu, *Qadi* juga sebagai rujukan terhadap penerapakan hukum, ia memainkan peranan penting dalam melaksanakan intrik-intrik istana. Sementara itu, yang terjadi di Sambas, sebutan Maharaja Imam sebagai gelar tertinggi diberikan oleh sultan Sambas yang ke-13, yaitu Marhum Cianjur atau Raden Afifuddin atau Raden Afifin bin Marhum Tajudin, bergelar Pangeran Adipati kemudian bergelar Sultan Muhammad Shafiuddin II (berkuasa 1866-1922 M) tepatnya pada tahun 1872 dengan mengangkat H. Muhammad Arif sebagai Maharaja Imam pertama. Dari keturunan H. Muhammad Arif inilah gelar Maharaja Imam digunakan.

Penelitian ini dibatasi pada persoalan sosial dan politik tahun 1913-1976 dan merupakan penelitian sejarah. Sehingga kajiannya difokuskan pada peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi dalam kurun waktu tersebut sehingga dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana latar historis lembaga Maharaja Imam di Sambas 1913-1976? dan 2) Bagaimana proses resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran?

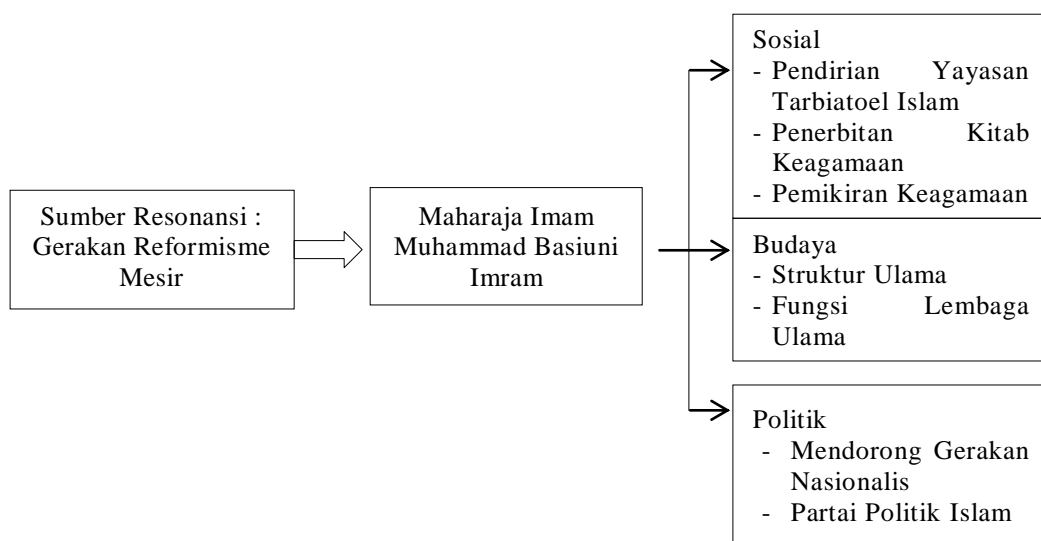
Kerangka Teori

Dalam tulisan ini, resonansi diartikan dengan mengikuti istilah bergetarnya benda lain akibat bunyi, yaitu saat dawai gitar dipetik dengan mengikuti aturan komposisi nada, maka denting musik bergema ke dalam rongga kecil di tengah gitar, menggetarkan katup tertutup, lalu merambat indah mengalun terdengar di telinga, menyentuh rasa, membangkitkan kenangan, dan menggerakkan reaksi raga, itulah resonansi (Khoirnafiyah, 2007: 126). Di dalam kehidupan, tidak dapat dipungkiri bahwa resonansi diperlukan untuk menggaungkan pesan, sehingga dapat diterima dalam kehidupan, baik yang berhubungan dengan aktivitas sosial, agama, politik, ekonomi dan lainnya, sehingga terjadi perubahan dalam berbagai aspek tersebut.

Susan Lepselter (2016: 4) memberikan pengertian resonansi sebagai rasa resonansi sungguh luar biasa menjadi modalitas ekspresif, sebuah teori vernakular, cara melihat dunia, menjadi sebuah isyarat dari cara tersebut kesemuanya membuat rasa. Resonansi dalam kajiannya adalah intensifikasi yang dihasilkan oleh tumpang tindih, hubungan timbal balik melalui tanda-tanda dari berbagai wacana (Lepselter 2014: 4). Narasi yang dibangun oleh Lepselter dalam kajiannya melihat gejala yang mempengaruhi secara intensif dan menghasilkan makna melalui resonansi dan disonansi dengan narasi budaya yang hidup di tengah masyarakat. Resonansi menjelaskan persoalan sosial, afektif, dan dimensi estetis dari berbagai perspektif, hubungan antara tanda-tanda, dan sering di pahami melalui proses politik. Dalam ilmu sosial-budaya-politik, resonansi digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh suatu gejala/fenomena diakibatkan getaran yang timbul oleh suatu gejala yang digetarkan (Khorinafiya, 2007: 123).

Sebagai konsepsi acuan dalam penelitian ini, gerakan reformisme Islam di Mesir sebagai sumber resonansi kepada Maharaja Imam dan lembaganya dapat dilihat dalam tiga aspek dengan pola sebagai berikut:

Bagan 1
Pola Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran



Metodologi Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka digunakan pendekatan sejarah. Dalam penelitian sejarah memiliki karakter khusus yaitu berguna memahami gejala dalam

dimensi waktu tertentu, kemudian mengembangkan segi-segi prosedural jalannya sebuah peristiwa dengan mengutamakan makna perubahan (*changes*) dan mendeskripsikan gejala secara diakronik (Abdurrahman: 2007). Hal ini sejajalan dengan yang disampaikan oleh Sartono Kartodirjo bahwa proses penelitian sejarah dengan metode demikian bertujuan untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Kartodirjo, 1990: 22). Dengan demikian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan masa lalu yang berhubungan dengan resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, agama, pendidikan dan politik dalam kurun waktu tahun 1913 hingga 1976.

Penelitian sejarah (*historical research*) bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta menganalisis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 1997: 16). Dalam kaitan inilah penelitian sejarah mempunyai peranan yang penting sebagaimana diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2003: 133), bahwa hanya dengan melihat ke masa lalu kita akan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Dalam penelitian sejarah, terdapat empat langkah utama yang harus dilakukan sebagai metode ilmiah, yakni: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil dan Diskusi

A. Sejarah Lembaga Ulama Di Sambas

Maharaja Imam adalah sebutan gelar bagi seorang pimpinan ulama di lingkungan istana Kesultanan Sambas, penggunaan Maharaja Imam pertama kali digunakan oleh Muhammad Arif tahun 1872 (Sunandar, 2013: 90). Penggunaan gelar tersebut tidak jelas motif dan tujuannya, akan tetapi asumsi yang berkembang adalah dikarenakan usia Muhammad Arif sudah lanjut maka penggunaan Maharaja Imam diberikan kepadanya oleh Sultan. Penggunaan gelar dalam struktur dunia Melayu terutama yang berhubungan dengan politik kekuasaan (kerajaan) sangat dimungkinkan terjadi bahkan merupakan hal yang biasa, misalnya anak Sultan yang akan menjadi raja dimasa berikutnya sebagai pengganti ayahnya, dimasa awal bergelar Raden, atau terkadang Pangeran Bendahara kemudian berubah menjadi Sultan.

Awal gelar Imam dipakai oleh salah satu pejabat tinggi di istana, menjadi anggota dewan Kerajaan bersama petinggi lainnya, yaitu Imam Ya'kub (antara tahun 1762-1786). Riwayat Imam Ya'kub sangat sulit ditemukan, bahkan catatan mengenai kiprah dan perannya selama menjabat di istana sulit ditelusuri. Diantara catatan yang menunjukkan tugas Imam Ya'kub di kesultanan Sambas adalah sebagai pujangga atau pencatat sejarah asal usul raja-raja Sambas. Pada saat pemerintahan dipimpin oleh Murhum Bungsu/Sultan Umar Aqamaddin II.

Tugas Imam Ya'kub tidak banyak diketahui, sehingga pada periode setelah Imam Ya'kub diangkatlah Haji Nuruddin Mustafa (1772-1823) pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Syafiuddin (1813-1826) (Sunandar, 2003: 55). Dalam masa ini Imam tidak hanya menjadi pembimbing agama, tugas Imam adalah mengenai banyak hal yang berkaitan dengan persoalan keagamaan di samping memberikan pelajaran agama di istana (Musa, 2003: 10). Belakangan dari keturunan Haji Nuruddin Mustafa ini lahir tiga Maharaja Imam

selanjutnya yaitu Haji Muhammad Arif (1823-1872), Haji Muhammad Imran (1873-1913) dan Haji Muhammad Basiuni Imran (1913-1976) (Sunandar, 2003: 90).

Diawal pemebentukannya, dimulai dari Imam Ya'kub dan Imam Haji Nuruddin Mustafa, kemudian dimasa Haji Muhammad Arif penggunaan Maharaja Imam dimulai tepatnya tahun 1972, gelar tersebut digunakan menurut Wan. M. Saghir Abdullah adalah dikarenakan usia Muhammad Arif telah lanjut (Sunandar, 2013: 90). Setahun setelah pelantikannya sebagai Maharaja Imam pertama yaitu tepatnya pada tahun 1873 ia meninggal dunia. Semenjak itu, penggunaan Maharaja Imam diteruskan dan dipakai sebagai gelar ulama tertinggi di kesultanan Sambas hingga pemerintahan kesultanan Sambas melebur menjadi wilayah Negara Indonesia.

Semenjak digunakannya gelar Maharaja Imam untuk menyebut pimpinan pejabat agama, telah terjadi dalam tiga struktur yang berbeda berdasarkan periode masing-masing Maharaja Imam, yaitu mulai dari Maharaja Imam Muhammad Arif, Maharaja Imam Muhammad Imran dan Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran, yaitu dapat dilihat dalam struktur sebagai berikut:

1) Periode Pertama Maharaja Imam Muhammad Arif (1823-1872)

Maharaja Imam : Muhammad Arif
Imam : Abdur Rahman
Khatib : Mustafa

2) Periode Kedua Maharaja Imam Muhammad Imran (1873-1913)

Maharaja Imam : Muhammad Imran
Imam : Hamid bin Abdur Rahman
Imam Muda : Abdul Gambri
Khatib : Mursal bin Mustafa
Khatib Sadana : Muhammad Djabir (Tomi, 2014: 67).

3) Periode Ketiga Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1913-1976)

Maharaja Imam : H. Muhammad Basiuni Imran
Imam Maharaja : H. Abdurrahman Hamid
Imam : H. Muhammad Djabir
Khatib dan Penghulu :
1. H. Muhammad Djubir
2. H. Muhammad Mursal
3. H. Muhammad Murthado
4. H. Muhammad Siddiq
5. H. Achmad Sharir (daerah Singkawang)
6. H. Muhammad Zahri (daerah Telok Keramat/Paloh)
7. H. Muhammad Zainuddin
8. H. Abdul Azis
9. H. Mi'radj Djabir (menggantikan Mohammad Djarni di Bengkayang)
10. H. Ma'as (Tebas kemudian dipindahkan ke Bengkayang)

11. Penghulu Ahmad Mi'raj (Bengkayang kemudian dipindahkan ke Sungai Raya)
12. Penghulu H. Muhammad Saning (Sungai Raya kemudian dipindahkan ke Tebas)
13. H. Isma'il Penghulu Jawai (Naskah Surat Perintah, 1942).

B. Biorafi Sigkat Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran

Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran lahir di Sambas pada tanggal 25 Zulhijjah 1302 H (16 Oktober 1885) di Kampung Dagang (± 2 KM dari pusat pemerintahan Sultan) (Mahrus, 2007: 31). Nama lengkapnya H. Muhammad Basiuni Imran bin H. Muhammad Imran bin H. Muhammad Arif bin H. Nuruddin bin H. Mustafa. Dalam sebuah karya Muhammad Basiuni Imran dituliskan lengkapnya hingga kakeknya yaitu al-Hajj Muhammad Basiuni Imran ibn al-Hajj Muhammad Imran Maharaja Imam ibn al-Hajj Muhammad Arif Maharaja Imam ibn al-Hajj Nuruddin Imam Sambas (Imran, 1918: 59). Garis keturunan Muhammad Basiuni Imran adalah percampuran antara keluarga Raja masa lalu dan pendatang yang berasal dari Bintan kepulauan Riau, yakni Cucu perempuan Raja Gipang yang bernama Tan Siti dinikahkan dengan seorang pendatang dari Bintan tersebut bernama Datok Cupu.

Pendidikan pertama Muhammad Basiuni Imran dilakukan dalam lingkungan keluarga, yaitu ayahnya mengajarkan pendidikan agama mulai dari mengenal dan membaca al-Qur'an. Dalam riwayat singkat yang ditulis oleh Muhammad Basiuni Imran sendiri atas permintaan G.F. Pijper sebagai berikut:

*“Pada waktu saya berumur 6 atau 7 tahun, ayah saya mengajar saya membaca Qur'an dan menyekolahkan saya di Sekolah Rakyat (Volksschool). Kemudian saya diajari dasar-dasar nahu dan saraf, yaitu dari kitab *âl-Jurrûmiyya* dan *Kaylânî*. Pada tahun 1319 H (1901-1902), saya dikirim ke Makkahal-Musharrafa untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk belajar bahasa Arab dan mendalami pengetahuan tentang Islam. Saya belajar nahu dan saraf dan juga fikih pada Tuan Guru Umar Sumbawa dan Tuan Guru Usman Serawak, sedang dari Tuan Shekh Ahmad Khatib Minangkabau saya khusus belajar fikih. Saya juga mempelajari sesuatu tentang bahasa Arab (nahu, saraf, ma'âni, badi', bayan), mantik dan beberapa ilmu pengetahuan lainnya seperti usul fikih, hadits, tafsir, dan tauhid dari Shaykh 'Alî Mâlikî (seorang Arab) dan dari yang lainnya. Pada tahun 1324 H (1906 M) saya kembali ke Sambas atas perintah ayahku.”* (Pijper, 1985: 142-143, Bruinessen, 1992: 26).

Muhammad Basiuni Imran di samping menerima pendidikan dalam lingkungan keluarganya melalui ayahnya, telah mengikuti pendidikan formal pada Sekolah Rakyatselama 2 tahun (Mahrus, 2007: 35). Di samping itu, pendidikan yang diterimanya lebih banyak pada sekolah Melayu yaitu di Madrasah al-Sulthaniyah (1868-1916 M) mempelajari dasar-dasar ilmu agama.

Tahun 1906 Muhamad Basiuni Imran kembali dari Makkah dan menjadi guru pada madrasah al-Sulthaniyah selama dua tahun. Kemudian bulan Zulkaidah 1328 H (Nopember-

Desember 1910 M) ia berangkat ke Mesir bersama dengan Saudaranya Ahmad Fauzi Imran dan Ahmad Su'ud untuk menuntut ilmu, ia berangkat menggunakan kapal Perancis dari Singapura ke Suez (Laffan, 2003: 138, Pijper, 1985: 144).

Mengenai karya Muhammad Basiuni Imran, terdapat beberapa buah buku yang diterbitkan di Mesir, Penang Malaysia, Tasik Malaya dan sebagian besarnya diterbitkan di Singapura pada percetakan al-Ahmadiyah. Ia mulai menulis sejak tahun 1912 ketika masih di Mesir. Jika dikategorikan karya Muhammad Basiuni Imran berhubungan dengan ilmu Ushuluddin, Fiqh, Sejarah, dan Ulumul Qur'an.

Bidang Ushuluddin

- 1) *Tarjamah Durûs al-Tarîkh Syarîat* (manuskrip tahun 1912)
- 2) *Bidâyah al-Tauhid fi 'Ilm Tauhid*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1918.
- 3) *Daras al-Tauhid* (Pelajaran tauhid), Singapura pada percetakan al-Matba'ah 1935.

Bidang Fiqih

- 1) *Cahaya Suluh, Pada Mendirikan Jum'at Kurang dari pada Empat Puluh*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1920
- 2) *al-Nusûs wa al-Barâhîn 'Alâ Iqâmat al-Jum'a Bimâ Dûna al-arbaîn* Kairo: al-Manâr, 1925
- 3) *Tadzki'r, Sabîlunnajâh fi Târik al-Salât*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1931.
- 4) *al-Janaiz*, Tasikmalaya: Galunggung, 1943.
- 5) *Ḍaw' al-Misbâh fi Faskh al-Nikâh*, Penang, 1938.
- 6) *Ḥusnu al-Jawâb 'an ithbâti al-ahillati bilhîsab: Molek Jawaban Pada Mentsa'bitkan Awal Bulan Dengan Kiraan*, Penang: Maktabah al-Zainiyah, 1938.

Bidang Sejarah

- 1) *Dzîkr al-Maulid al-Nabawi* (Mengingat Kelahiran Nabi)
- 2) *Khulâsah as-Sîrah al-Muhammadiyah, Hakikat Seruan Islam*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1932.
- 3) *Nûr al-Sirâj fi Qissah al-Isra'*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1938.

Ulumul Qur'an

- 1) *Irsyâd al-Ghilmân, ilâ Adâbi Tilâwah al-Qurân*, Singapura: al-Ahmadiyah, 1934.

Naskah yang belum sempat diterbitkan

- 1) *Manhal al-Gharibin fi Iqamat al-Jumu'ah bi dun al-Arba'in, at-Tazkirat Badi'ah fi Ahkamil Jum'ah*.
- 2) *al-Ibanah*, Tafsir Sura-surat Pendek (Juz Amma),
- 3) *Buduwutsarah fi Ahkami al-Hajji wal Umrah*.

C. Proses Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni di Sambas

a. Bidang Sosial

- 1) Pendirian Yayasan Tarbiatoel Islam

Tarbiatoel Islam (Tarbiatul Islam) adalah sebuah madrasah yang didirikan oleh ulama Sambas, diantaranya adalah Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran. Lembaga ini didirikan pada tanggal 19 April 1936. Dalam *Statuten en Huishoudelijk Reglement*, Perkoempoelan “Tarbiatoel Islam” Sambas, dinyatakan bahwa tujuan pendiriannya adalah:

“perserikatan ini bermaksoed:

Memadjoekan dan mengembirakan (menggemarkan) pengadjaran dan Peladjaran agama Islam dalam Keradjaan Sambas dan memadjoekan dan mengembirakan (menggemarkan) tjara kehidoepan sepanjang kemaean agama Islam kepada anggota-anggotanja (lid-lidnja) (Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1936: 3).

Respon terhadap kondisi pendidikan yang terjadi di Sambas tidak hanya berasal dari Muhammad Basiuni Imran, akan tetapi datang dari luar, yaitu seorang dokter yang berasal dari Minangkabau bernama dr. Syahrial dan seorang Guru H.I.S. bernama Ali Imran. Dalam pertemuan itu diputuskanlah Madrasah al-Sulthaniyah akan di jadikan *Schakel School* (Sekolah penghubung), dengan pola pengajaran seperti Sekolah umum Belanda, namun tetap mempertahankan ciri pendidikan Islam (Mahrus, 2003: 86-87), dalam Fatsal 3 disebutkan sebagai berikut:

“Perserikatan ini bersoenggoeh-soenggoeh hendak menjampaiakan hadjatnya dengan:

- a. Mendirikan dan memeliharaakan atau membantoe Sekolah-Sekolah jang diberi peladjaran hal permoeaan adjaran agama Islam dan ilmoe-ilmoe jang biasa diadjarkan pada Sekolah H.I.S. dan sebangsanja.*
- b. Mengichtiarkan, soepaja segala anggota dan segala orang jang berhak mendapat tempat jang sebagoes-bagoesnya dalam masjrakat hidoep.*
- c. Mengadakan kesempatan boeat pendidikan Moeballig (Moebassjir) jang menjebarkan (mengembangkan dan menaboerkan) agama Islam ke soedoet-soedoet dikerajaan Sambas.*
- d. Mengadakan perkoempoelan anggota-anggotanja dan orang-orang jang soeka datang; disitoelah dibitjarakan perkara-perkara agama Islam (tablig-tablig).” (Statuten en Huishoudelijk Reglement, 1936: 4).*

Pendirian Yayasan Tarbiatoel Islam yang melahirkan Madrasah Tarbiatoel Islam adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan Basiuni Imran agar Sekolah tersebut tidak digolongkan dalam Sekolah liar oleh pemerintah Kolonial Belanda yang pada akhirnya akan ditutup dengan tragis oleh pemerintah. Langkah ini tentu saja sangat tepat dilakukan dalam suasana pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat terutama masyarakat Islam. Di Sambas pada masa itu telah ada Sekolah misi kristen yang mewakili Sekolah pemerintah kolonial yang dianggap resmi, jika disandingkan dengan Madrasah al-Sulthaniyah tentu saja sangat bertolak belakang, di mana Sekolah misi adalah bagian dari produk kolonial dan didukung oleh kekuatan politik. Jika Basiuni Imran tidak jeli melihat kondisi politik masa itu, maka besar kemungkinan Sekolah Tarbiatoel Islam dapat didirikan dan bertahan lama.

Gagasan pembaharuan pendidikan yang dilakukannya sesungguhnya tidak dapat kita lepaskan dari latar belakang keilmuannya yaitu sebagai murid Rasyîd Riḍâ. Pendidikan Islam yang telah mengadopsi pendidikan kolonial seperti yang diterapkan oleh Basiuni Imran ini adalah respon terhadap kemajuan pendidikan yang dilaksanakan oleh kolonial dalam lingkungan pendidikan Islam yang masih bersifat tradisional di kerajaan Sambas. Yayasan Persatuan Tarbiatul Islam (PERTI) yang terbentuk dan melahirkan Sekolah Tarbiatoel Islam tersebut di atas, adalah respon terhadap perkembangan pembaharuan yang terjadi di nusantara pada abad ke-20. Di masa awal abad ke-20 Karel A. Steenbrink (1986: 26) mengasumsikan terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan (*renaissance*). Perubahan ini, menjadi isu sentral yang menyebar dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya pada satu daerah, melainkan hampir di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah kerajaan Sambas.

2) Penerbitan Kitab Keagamaan

Sebagaimana di awal sudah disebutkan bahwa Mesir telah membawa pengaruh baru dalam pemikiran Islam di Nusantara dan tradisi cetak dalam dunia Melayu seperti munculnya majalah al-Imam dan al-Munir. Penerbitan gagasan dengan mengarang kitab telah mulai dilakukan Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran ketika masih di Mesir, beberapa karyanya di terbitkan melalui percetakan al-Manar. Gagasan pemikiran pembaharuan Muhammad Basiuni Imran jika diperhatikan dalam karyanya dimulai dengan membahas persoalan-persoalan inti dalam Islam seperti masalah Tauhid (*Bidâyah al-Tauhid fî 'Ilm Tauhid*), baru kemudian dilanjutkan dengan persoalan-persoalan khilafiyah.

Kitab yang dikarang oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran, jika dikategorikan, maka lebih banyak karya yang bernuansa fikih, hal ini merupakan wujud keseriusannya dalam memegang amanah sebagai Maharaja Imam. Melalui fikih menimbulkan kerawanan terjadinya konflik pemikiran yang berakibat pada perpecahan, apalagi jika dilihat kondisi Sambas kala itu, pemahaman terhadap fiqih masih dangkal. Penerapan Fikih yang disajikan oleh Muhammad Basiuni Imran merupakan upaya untuk mensinergikannya dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Kontekstualitas ruang ketika agama Islam diterapkan dalam masyarakat memperkuat fakta bahwa hukum Islam pada dasarnya merupakan *resultante* (hasil) dari interaksi anatara para ulama dan faktor-faktor yang ada disekitarnya (Rahmatullah, 2003: 12).

Selain kontekstualitas pemahaman masyarakat Sambas, dalam tradisi ulama yang terdapat di Sambas, hanya Muhammad Basiuni Imranlah yang memiliki banyak karya. Melalui karya tersebut telah membuka nuansa baru dalam lingkungan masyarakat Islam Sambas akan pentingnya percetakan (kitab) yang dapat dijadikan sebagai pegangan umat Islam dalam mempelajari agama. Kondisi modernitas (percetakan) seperti inilah yang menurut Burhanudin dipelajari oleh Ulama Jawi ketika berada di Mesir bersama-sama dengan gagasan pembaharuan Rasyîd Riḍâ (Burhanuddin, 2017: 383) melalui percetakan majalah, surat kabar dan kitab-kitab karangan ulama Jawi. Percetakan di Sambas tidak ditemukan sebelum kemerdekaan tahun 1945. Walaupun sebenarnya pengalaman ulama Sambas dalam percetakan majalah telah dimiliki oleh

Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dan adiknya Ahmad Fauzi Imran ketika belajar di Mesir, yaitu pada majalah *al-Ittih}a>d*. Dalam tahun 1918 yakni lima tahun setelah mereka kembali dari Mesir Ahmad Fauzi Imran yang memiliki pengalaman lebih dominan dalam bidang percetakan meninggal dunia. Sangat dimungkinkan tidak adanya percetakan di Sambas karena tidak ada tenaga ahli disamping keterbatasan sarana lainnya, baru kemudian dalam tahun 1955 aktifitas penerbitan majalah mulai terlihat di Sambas.

Dalam upaya menghadirkan kitab-kitab agama untuk kalangan masyarakat Melayu di Sambas yang tidak dapat membaca teks Arab, suatu usaha telah dilakukan oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran, yaitu membentuk semacam dewan penterjemahan yang terdiri dari 10 orang pejabat agama di yang diperintahkan oleh Maharaja Imam yang ditunjuk Muhammad Djabir selaku ketua, dan lainnya sebagai anggota yaitu H. Abdurrahman Hamid (Imam Maharaja), H. Muhammad Djubir (Khatib dan Penghulu), H. Muhammad Mursal (Penghulu), H. Muhammad Murtado (Penghulu), H. Muhammad Siddiq (Penghulu), Ahmad Sarir (Penghulu) dan Muhammad Basiuni Imran (Maharaja Imam). Kitab yang dipilih adalah *Tafsir Baidhawi* (karya *al-Baydhawi Anwar al-Tanzil*). Tafsir ini pernah disadur untuk pertama kali di Nusantara oleh Abdul Rauf al-Singkili (1024-1105/1615-930) (Azra, 2007: 202-204) di Aceh dalam bahasa Aceh. Tugas utamanya adalah menterjemahkan tafsir tersebut dengan menggunakan bahasa Melayu Sambas. Pada bagian awal surah dituliskan masing-masing nama penyalin sampai lengkap 30 juzz. Hasil terjemahan tersebut dicetak untuk dipergunakan oleh para ulama di Kesultanan Sambas.

3) Pemikiran Keagamaan

Pada awal abad ke-20 telah terjadi Konferensi ‘Alim Ulama’ Kalimantan Barat. Hal ini adalah bentuk respon ulama terhadap kondisi umat Islam yang terjadi di wilayah tersebut, digambarkan bahwa umat Islam tengah mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh mereka sendiri, yaitu tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang agama (aqidah, syariat dan akhlak), politik, dan pendidikan Islam. Muhammad Basiuni Imran menyoroti persoalan tersebut ke dalam 10 bagian persoalan yang harus menjadi titik tekan dalam memajukan umat Islam.

Dalam waktu yang berbeda, terutama ketika Muhammad Basiuni Imran menjadi salah satu *iftifta* (peminta fatwa) pada majalah *al-Mana>r*, dan menjadikannya sebagai salah satu *mustafti* terkemuka, bahwa perhatiannya adalah mengenai kondisi umat Islam yang tengah mengalami kemunduran dibawah pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Respon yang diberikan oleh Amir Shakib Arslan (1864-1946) terhadap pertanyaan tersebut menunjukkan terjadinya kemunduran dikarenakan oleh umat Islam itu sendiri, maka agar umat Islam dapat keluar dari keterburukan tersebut tidak lain adalah dengan mempersiapkan setiap muslim menjadi orang yang benar-benar mampu merepresentasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena pada prinsipnya bangsa Eropa atau negara-negara yang dicontohkan oleh Muhammad Basiuni Imran adalah negara yang tetap memegang tradisi keagamaan mereka sendiri (Arslan, 1351)

Respon terhadap jawaban yang diberikan oleh Arslan tersebut direalisasikan Muhammad Basiuni Imran melalui konferensi Alim Ulama, walaupun dalam pidatonya

tidak menyebutkan gagasan Arslan ketika menjawab pertanyaannya. Dari sepuluh poin penting yang diutarakan Muhammad Basiuni Imran yaitu: 1) keyakinan terhadap Islam, 2) kewajiban menjalankan syariat, 3) keyakinan terhadap al-Qur'an sebagai pedoman, 4) kemuliaan Rasulullah, 5) memanfaatkan alam dan tidak merusaknya, 6) Islam sebagai penyempurna kehidupan, 7) memperhatikan hukum pada masa Nabi, 8) memperhatikan ulama-ulama *salaf*, 9) Islam sebagai agama tauhid dan persatuan, dan 10) tidak terpengaruh dengan Bid'ah dalam beribadah dan menghindari Taqlid buta.

Sepuluh poin di atas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam memajukan Islam dan umat terutama di wilayah Kalimantan Barat. Yang menarik dalam pidato tersebut bahwa persoalan bid'ah dan perpecahan umat menjadi bagian yang lebih di tekankan oleh Muhammad Basiuni Imran. Gerakan modernis Islam di Indonesia yang berawal dari daerah Minangkabau telah menunjukkan bahwa upaya membersihkan praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari dari unsur bid'ah dan khurafat disamping perubahan sistem pendidikan dan politik sebagai inti gerakan tersebut. Kemudian berkembang ke berbagai daerah lain dengan motif yang sama, akan tetapi menunjukkan perbedaan reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat di tiap-tiap daerah. Di Jawa dua organisasi yang paling keras dalam menyuarakan gerakan pengahbusan bid'ah dan khurafat adalah Muhammadiyah dan Sarekat Islam (Laffan, 2003: 170). Organisasi tersebut juga masih berhubungan dengan pusat gerakan pembaharuan yaitu Mesir.

b. Bidang Politik

1) Mendorong Gerakan Nasionalis

Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran merupakan salah satu tokoh yang hidup dalam beberapa periode politik yang berbeda, sejak ia dilantik sebagai Maharaja Imam dimasa periode kekuasaan Kesultanan Sambas yang dipengaruhi oleh dominasi Kolonial Pemerintah Hindia Belanda hingga Orde Baru yang dapat diidentifikasi menjadi empat periode besar, yaitu 1) Periode Kesultanan Sambas di samping kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda 1913 hingga 1942, 2) Periode pendudukan Jepang 1942-1945, 3) Pendudukan NICA (Nederlandsch Indie Civile Administration) 1945-1949, dan 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (orde lama dan Orde Baru) hingga 1976.

Dalam empat periode besar tersebut, yang paling banyak terjadi pergolakan baik fisik maupun pemikiran adalah ketika periode pendudukan NICA hingga tahun 1950-an terutama persaingan politik Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang digagas oleh Presiden Soekarno tahun 1960 dikarenakan kondisi politik saat itu, sehingga muncul dua opsi yang ditawarkannya, yaitu gagasan mengenai partai monolitik atau mengurangi pengaruh partai-partai dengan cara menyatukannya menjadi sebuah koalisi yang besar dibawah kebijakan Demokrasi Terpimpin (lihat Latif, 2013: 433). Untuk mengetahui dampak pemikiran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam mendorong gerakan sosial politik, maka peneliti akan membahas pada dua periode terakhir yaitu masa kedatangan tentara NICA dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan ketersediaan data dan keikutsertaan Muhammad Basiuni Imran dalam sistem politik yang terjadi.

Pasca kekalahan tentara Jepang dalam perang dunia ke-2 pada bulan Agustus tahun 1945 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik dan keamanan di tanah air yaitu Indonesia merdeka disamping keinginan kuat pemerintah Hindia Belanda untuk kembali menguasai tanah jajahan, sehingga pasca perang Dunia II, pemerintah Belanda melancarkan operasi militer dalam sejarahnya guna mengambil kembali tanah jajahan Hindia-Belanda dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik Belanda (Oastidie, 2016: 4), hal itu didasari oleh pasca pendudukan Jerman di Belanda sehingga menyebabkan mereka menjadi sangat miskin, sehingga jalan keluarnya adalah mengambil kembali tanah Jajahan. Misi tersebut dibarengi dengan moto *Voor Orde en Vrede* (untuk ketertiban dan perdamaian). Antara September 1945 dan awal tahun 1946 menjadi saat-saat penting bagi kejaraan Belanda untuk menjalankan misi tersebut dibawah pimpinan Letnan Gubernur Jendral Huib van Mook mulai kembali kekuasaannya di Batavia/Jakarta dengan membawa tentara KNIL (*het Koninklijke Nederlands-Indische Leger*) dengan jumlah yang bervariasi dari tahun 1945 hingga 1950 (Oastidie, 2016: 4).

Penolakan terhadap kehadiran kembali Belanda dalam tahun 1945 di tanah air memiliki ragam dan bentuknya, di Sambas terbentuk organisasi Persatuan Bangsa Indonesia Sambas (PERBIS) yang disebut Ooi Keat Gien sebagai organisasi underground (Gien, 2013: 74) (bawah tanah), Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), dan beberapa organisasi lain yang terdapat di Kalimantan Barat termasuk penyerangan terhadap tentara NICA dan KNIL diberbagai daerah diilhami dari gerakan yang dimulai dari Sambas pada 27 Oktober 1945.

Melihat gerakan-gerakan politik dan sosial yang terjadi di Sambas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi sosial-politik masa lalu, yakni Sebelum kekuasaan kolonial, struktur politik di Asia dan Afrika menurut Taufiq Tanasaldy yaitu menggunakan sistem sosial dan politik yang bertingkat. Dalam struktur seperti itu, garis keturunan dan keluarga menempati tingkat atas diikuti oleh anggota lainnya, pejabat aristokrasi dan pemerintah. Lapisan atas kelas sosial ini menikmati banyak keistimewaan. Di tingkat bawah biasanya duduk rakyat jelata atau bahkan budak yang memiliki jumlah hak paling sedikit tetapi banyak kewajiban (Tanasaldy, 2002: 16). Dalam banyak kasus, hierarki ini dipertahankan setelah kekuasaan kolonial mengambil alih. Dalam gerakan yang dibangun di Sambas menghadapi kehadiran NICA dengan tentara KNIL pihak-pihak yang terlibat adalah masih dalam rumpun kekerabatan yang sama, seperti Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran beberapa saudaranya ikut andil dalam gerakan, dan menantunya Uray Abdul Hamid H. Mahmud anak seorang Imam di bawah jabatan Maharaja Imam ikut terlibat dan dipenjara oleh NICA. Lalu keluarga Suud yang juga masih memiliki hubungan saudara menjadi pimpinan gerakan PERBIS yaitu H. M. Siradj Suud. Sementara masyarakat awam yang tidak memiliki hubungan kekerabatan baru muncul kemudian pasca peristiwa 27 Oktober 1945 yang menewaskan Tabrani Ahmad. Keikutsertaan masyarakat awam dalam masa revolusi kemerdekaan semakin terlihat ketika terjadi penyerangan markas militer belanda (Tangsi) pada 10 Januari 1949.

2) Partai Politik Islam

Keterlibatan Basiuni Imran dalam partai politik Islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. salah satunya Masyumi di Sambas yang telah mengusungnya sebagai calon anggota Konstituante tahun 1956 tidak begitu terlihat. Dalam arti Basiuni Imran tidak termasuk sebagai salah satu pengurus partai. Akan tetapi ia terpilih sebagai anggota Konstituante tahun 1956 dari partai ini. Dalam konferensi yang dilakukan 15 Januari 1956, Masyumi Sambas merumuskan program-program yang akan dilaksanakan beserta pemilihan pengurus. Konferensi tersebut dilaksanakan di Madrasah Tarbiatoel Islam Sambas (Suara Masjumi, 1956: 22).

Setelah konferensi yang dilaksanakan di Sambas, beberapa waktu kemudian, Masyumi telah terbentuk di daerah lain seperti di Pemangkat, Tebas (Suara Masjumi, 1956: 3) bahkan di tiap ranting. Untuk melihat contoh bagaimana respon di tingkat Ranting (Desa) dapat dilihat apa yang terjadi di Desa Penakalan dengan jumlah 175 anggota (Naskah, 1954). Jumlah yang sangat besar untuk sebuah desa yang terbilang kecil.

Jika melihat susunan pengurus Masyumi Cabang Sambas, maka kita tidak menemukan peran Basiuni Imran dalam partai politik, akan tetapi karena perannya sebagai Maharaja Imam dan keilmuannya, ia dipercaya mewakili Sambas dalam pemilihan anggota Konstituante tahun 1956. Secara langsung peran Muhammad Basiuni Imran memang tidak terlihat, akan tetapi partai Masyumi Cabang Sambas dalam menjalankan visinya sebagai partai Islam menghadapi rival politiknya yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Kondisi lain menunjukkan hal berbeda, bahwa di Sambas, persaingan partai sesungguhnya terjadi dalam ruang yang masif, yaitu etnisitas hal ini ditunjukkan oleh Tanasaldy dalam penelitiannya bahwa Partai Persatuan Dayak (PD) di Kalimantan Barat telah mengejutkan banyak saingan partai besar lainnya dan melampaui Masyumi. PD dan Masyumi adalah dua partai yang memperoleh lebih dari 30 persen suara di Kalimantan Barat. PNI memperoleh kurang dari 17 persen menempati posisi ketiga, ia juga mengutip pandangan Herbert Feith bahwa PD sebagai satu-satunya kisah sukses Partai politik lokal dan berbasis etnis dalam pemilu 1955 (Tanasaldy, 2002: 100). Pergulatan politik yang terjadi kala itu, didukung oleh penerbitan majalah lokal yang dipimpin oleh Asfia Mahyus dan sejak awal ternyata sudah menjangkau pengurus pusat Masyumi yang dilakukan oleh Asfia Mahyus untuk meminta K. M. Isa Anshary (anggota Pengurus Pusat Partai Masyumi) memberikan tanggapan terhadap terbitnya majalah tersebut sekaligus memintanya untuk memberikan arahan dalam menghadapi pemilihan anggota Konstituante 1956 (Tjahaja Islam, 1955: 5). Bahkan Isa Anshary dijadikan sebagai salah satu anggota Pembantu Kehormatan pada majalah 'Tjahaja Islam' bersama Mohammad Natsir dan Ghazali Hasan.

Keterlibatan Muhammad Basiuni Imran dalam ranah politik tanah air bersama-sama dengan tokoh nasional Islam lainnya dimulai ketika diundang oleh Menteri Agama K.H. Masykur pada tanggal 2-7 Maret 1954 dalam konferensi ulama di Cipanas yang bertujuan untuk menanggapi semakin luasnya pengaruh S.M. Kartosoewirjo yang diangkat sebagai Imam umat Islam Indonesia oleh kelompok Darul Islam (Suryanegara, 2015: 350, Zuhri, 2013: 541, Zahro, 2014: 58). Kehadiran para ulama yang berasal dari

berbagai daerah kecuali Yogyakarta dalam konferensi tersebut melibatkan partai politik Islam yang telah ada sebelumnya seperti Perti (Persatuan Tarbiah Islam), NU, Masyumi dan partai Islam lainnya disamping respon terhadap PKI yang telah mendekati Presiden Soekarno sebelum pemilu 1955 (Suryanegara, 2015: 350). Memang sepanjang periode 1950-1957, partai-partai besar ini, kecuali PKI, merupakan pemain-pemain utama dalam urusan pemerintahan, dengan PNI dan Masyumi sebagai penggerak utama (Latif, 2013: 422).

Melihat gerakan partai politik menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, menurut Latif telah muncul suatu polarisasi eksternal dan fragmentasi internal yang berlangsung dalam tradisi-tradisi politik Indonesia, terdapat 172 partai dan kelompok kuasi-politik yang terlibat. Berbarengan dengan perkembangan itu, kebebasan pers menjadi sebuah fenomena menarik. Setelah mengalami masa-masa sulit selama revolusi kemerdekaan, jumlah harian di Indonesia melonjak dengan cepat dari 67 pada 1950 menjadi 120 pada 1957 (Latif, 2013: 421). Kondisi ini pula dialami di Sambas dengan munculnya partai lokal, dan majalah 'Tjahaja Islam' menjadi bagian yang ikut meramaikan pola perpolitikan di daerah dan tanah air.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka tulisan ini disimpulkan sebagai berikut: Sejarah lembaga Maharaja Imam dalam struktur kesultanan Sambas dimulai sejak tahun 1762 yang dipakai oleh Imam Ya'kub (1762-1786). Imam menjadi salah satu pejabat penting dalam struktur kesultanan Sambas bersama dengan pejabat tinggi lainnya, di awal kemunculannya, tugas yang dibebankan kepada Imam menyangkut persoalan-persoalan yang tidak hanya mengurus masalah keagamaan, terkadang ia berfungsi sebagai pujangga Istana, mencatat silsilah keturunan raja-raja Sambas. Dalam bidang agama tugasnya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pelayanan agama dalam lingkungan Istana Sultan.

Bentuk resonansi Muhammad Basiuni Imran menysasar tiga aspek utama, yaitu sosial, budaya dan politik. Dalam bidang sosial, resonansinya meliputi pendirian yayasan Tarbiatoel Islam, penerbitan kitab keagamaan dan pemikiran keagamaan. Dalam bidang budaya pula, bentuknya adalah pada institusi lembaga Ulama yang terdapat dalam istana, yaitu struktur lembaga ulama dan meningkatkan fungsi lembaga ulama sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam di Sambas. Pada bagian terakhir yaitu resonansi politik Maharaja Imam terjadi dalam dua kecenderungan utama, yaitu mendorong pergerakan nasionalisme dan bergabung dalam partai politik Islam kala itu, yaitu bergabung dengan partai Masyumi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Burhanuddin, Jajat. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan.
- Gien, Ooi Keat. (2013) *Post-War Borneo, 1945-1950: Nationalism, Empire and State-Building*, Milton Park: Routledge.
- Imran, Muhammad Basiuni. (1943). *al-Janaiz*, Tasik Malaya: Galunggung.
- . (1918). *Bidâyah al-Tauhîd fî 'Ilm Tauhid*, Singapura: al-Ahmadiyah.
- . (1920). *Cahaya Suluh, Pada Mendirikan Jum'at Kurang dari pada Empat Puluh*, Singapura: al-Ahmadiyah.
- . (1932). *Khulâsah as-Sîrah al-Muhammadiyah, Hakikat Seruan Islam*, Singapura, al-Matba'ah.
- . (1934). *Irsyâd al-Ghilmân, ilâ Adâb Tilâwah al-Qurân*, Singapura, al-Matba'ah.
- . (1938). *Husnu al-Jawâb 'an Ithbâti al-Ahillati Bilhîsab: Molek Jawaban Pada Mentsa'bitkan Awal Bulan Dengan Kiraan*, Penang: Maktabah al-Zainiyah.
- . (1938). *Nûr al-Sirâj fî Qissah al-Isra'*, Singapura: al-Ahmadiyah.
- Kartodirjo, Sartono (ed). (1990). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Khoirnafiya, Siti. (2007). 'Resonansi: Suatu Perspektif Dalam Kajian Gerakan Politik-Keagamaan Ikhwanul Muslimin Di Indonesia', dalam Ketut Wikantika (ed), *Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia 2017*, Bandung: ITB.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metode Sejarah*, edisi ketiga Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Laffan, Micheal Francis. (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia; The Umma Below the Winds*, New York: Routledge Curzon.
- Lepselter, Susan. (2016). *The Resonance of Unseen Things: Poetics, Power, Captivity, and UFOs in the American Uncanny*, Amerika: University of Michigan Press.
- Muhammad Shafiuddin, (1955). *Surat Perintah*, Sambas 25 Syawal tahun 1333 bersamaan 6 September.
- Musa, Pabali. (2003). *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat, Kajian Naskah Asal Raja-Raja dan Salsilah Raja Sambas*, Pontianak : STAIN Pontianak Press.
- Oastidie, Gert, dkk. (2016). *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*. Terj. Susi Moeimam, dkk, Jakarta: KITLV.

- Panitia Pemeriksaan. (1956). *Petikan Surat Keputusan Panitia Pemeriksaan No. 305305/1956.k*, Jakarta.
- Patoni, Ahmad. (2007). *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Pijper, G. F. (1985). *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin Jakarta: UI Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Rahmatullah, Muhammad. (2003). *Pemikiran Fikih Maharaja Imam Kerajaan Sambas Muhammad Basiuni Imran 1885-1976.*, Pontianak, Bulan Sabit Press.
- Redaksi. (1955). 'Program 'Tjahaja Islam' dalam *Majalah Pembina Tenaga Umat; Tjahaja Islam*, Nomor Uchuwatun Hasanah.
- Redaksi. (1956). 'Berita Keluarga', *Suara Masjumi*, No. 7 Th. Ke XI, 1 Maret.
- Statuten en Huishoudelijk Reglement. (1936). *Perkoempoelan "Tarbiatoel Islam"* Sambas, Pontianak: Boekhandel & Drukkerij Phin Min.
- Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: LP3ES.
- Sunandar. (2013). "Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan al-Watzikhoebillah Sambas 1913-1976", *Tesis* tidak diterbitkan Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Suryabrata, Sumardi. (1997). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2015). *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, jilid kedua, Bandung: Surya Dinasti.
- Tanasaldy, Taufiq. (2002). *Regime Change And Ethnic Politics In Indonesia: Dayak Politics Of West Kalimantan*, Laiden: KITLV Pres.
- van Bruinessen, Martin. (1992). 'Basyuni `Imran Muhammad Basyuni b. Muhammad `Imran, Sambas, West Borneo, 1885-1953.' dalam *Dictionnaire Biographique des Savants et Grandes Figures du Monde Musulman Périphérique, du XIXe Siècle à Nos Jours*, Fasc. no 1. Paris: CNRS-EHESS.

Zahro, Ahmad. (2004). *Tradisi Intelktual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS.

Zen, Fathurin, (2004). *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: LKiS.

Zuhri, Saifudin. (2013). *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.